

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh setiap pemerintahan di berbagai negara, tidak terkecuali pengawasan kepada pemerintahan Indonesia karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan dapat mempengaruhi kinerja dari pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan arah tujuan bangsa Indonesia yang telah termaktub dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi landasan seutuhnya tentang arah dan tujuan bangsa yang harus dibawa oleh pemerintah yaitu menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses kontrol sosial atau pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pembelajaran tentang pemahaman dan kesadaran akan sebuah wewenang dan kekuasaan yang di berikan oleh rakyat dan diberikan tanggung jawab tersebut kepada para pejabat yang telah dipilih guna menjalankan pemerintahan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia dan memperkecil peluang terjadinya sebuah kesalahan atau penyelewengan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan karena masifnya fungsi kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan maupun organisasi-organisasi yang tersebar secara nasional di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang memiliki corak sistem politik yang demokratis hubungan antara wakil dan yang diwakilkan sangat besar sehingga terdapat sebuah relasi yang baik dan mendukung adanya sebuah pengawasan atau *punishment* yang kuat dari yang diwakilkan kepada yang mewakili dalam hal tersebut adalah para pejabat pemerintahan seperti DPR, DPRD, dan Lembaga pemerintahan lainnya, kalau kita mencermati perilaku wakil rakyat kita, termasuk para anggota DPRD, terlihat tidak ada ketakutan memperoleh *punishment* untuk tidak terpilih dalam pemilu berikutnya. Paling tidak, terdapat dua penjelasan mengenai hal ini. Pertama, sistem pemilu di Indonesia yang proporsional. Di dalam sistem ini personal, yang lebih banyak menentukan seseorang yang menjadi wakil rakyat adalah partai. Kedua, para wakil rakyat bisa saja berpandangan belum tentu mereka bisa terpilih pada pemilu berikutnya. Karena itu, kurun waktu jabatannya dipakai sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kekayaan.¹

Hingga pada abad ke 21 pemerintahan di Indonesia masih memegang teguh cita-cita dan tujuan bangsa. Tujuan negara Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah: “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

¹ Kacung Maridjan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 164.

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila)”.²

Pada tahun 2019 Indonesia melakukan proses pemilihan umum untuk ke-12 kalinya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota legislatif untuk memimpin selama 5 tahun kedepan dan pada pemilu ini pula menandakan corak pemerintahan dan sistem di negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan pemilihan kepala negara ditentukan atas kehendak rakyatnya sendiri.

Pada pemilu tahun 2019 Presiden Joko Widodo terpilih kembali untuk melanjutkan periode ke dua dalam pemerintahannya setelah berpasangan dengan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, selama masa pemerintahan periode keduanya banyak sekali fenomena-fenomena politik yang terjadi seperti yang telah disebutkan bahwa kasus-kasus korupsi masih marak terjadi dan pada puncaknya yaitu tahun 2020 pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengalami masa yang sulit tak terlepas dari terjadinya sebuah pandemi virus Covid-19 yang melanda diseluruh negara di dunia dan berdampak cukup vital bagi jalannya pemerintahan. Perencanaan-perencanaan pembangunan serta lainnya harus beralih fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 yang pada awal penyebarannya di Indonesia cukup banyak memakan korban jiwa yang membuat pemerintahan harus bertindak cepat dalam merumuskan sebuah solusi dalam bentuk kebijakan dan peraturan-peraturan yang akan diberikan kepada

² Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 55.

masyarakat, karena memang salah satu output dari jalannya sebuah pemerintahan adalah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hasil dari perumusan-perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya lembaga legislatif yaitu DPR serta lembaga eksekutif yang mana Presiden memiliki wewenang penuh atas di sahkan atau tidaknya sebuah kebijakan karena pada hakikatnya satu saja kebijakan di sahkan oleh Presiden hal tersebut akan berdampak besar pada pemerintahannya karena hasil dari pemerintahan yang baik adalah dengan menghasilkan program-program serta kebijakan yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat keseluruhan, jika kebijakan serta program pemerintah tersebut dianggap benar maka dukungan dari masyarakat akan didapatkan, tetapi sebaliknya jika kebijakan yang di sahkan oleh presiden tidak berpihak kepada masyarakat maka sudah dipastikan sebuah protes akan muncul dari masyarakat.

Pemerintahan presiden Joko Widodo di tahun 2020 yang cukup berat pada akhirnya tetap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak jarang kebijakan pemerintah tersebut justru membuat adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintahnya sendiri. Masyarakat sipil atau Civil Society adalah instrumen terpenting dalam sebuah negara, masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya terkait baik atau buruknya pemerintahan, kekuatan masyarakat sipil tidak hanya sebatas dalam menyatakan pendapat terhadap pemerintahan saja tetapi kepada kontrol sosial terhadap pemerintahan maupun tentang kondisi sosial politik yang terjadi. Terlebih Indonesia merupakan negara demokrasi maka kekuatan civil

society sewajarnya adalah tidak terkalahkan karena pada konsep demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan cukup mengundang perhatian adalah kepastian mengenai pelaksanaan pilkada yang sempat tertunda atas pertimbangan kesehatan karena pada tahun yang sama terjadi pandemi yang sebelumnya telah dijelaskan dan tidak diperkirakan akan sampai ke Indonesia hal tersebut membuat pemerintah bergerak cepat dalam membuat atau meregulasikan kebijakan-kebijakan baru agar dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 bukan tanpa adanya rintangan dan hambatan karena sebelumnya pilkada tersebut direncanakan dapat terlaksana pada tanggal 23 september 2020 namun kemudian di undur menjadi tanggal 9 desember 2020 yang mana keputusan ini merupakan hasil dari rapat yang telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan pada akhirnya keputusan ini pun disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah inipun memunculkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat sehingga menciptakan terbelahnya masyarakat menjadi beberapa bagian, yang mana beberapa masyarakat mendukung tetap diadakannya pilkada dengan alasan hal tersebut merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menentukan pemimpin di setiap daerah sehingga penting untuk tetap dilaksanakan. Tetapi, beberapa masyarakat juga

justeru mengaharapkan penyelenggaraan pilkada untuk diundur sampai ditemukan dan diterapkannya vaksin Covid-19 secara maksimal kepada masyarakat agar masyarakat lebih terlindungi kesehatannya terlebih banyaknya daftar pemilih tetap yang memiliki usia lanjut sehingga meningkatkan resiko penularan. Terakhir terdapat pula pandangan masyarakat yang setuju sekaligus menolak kebijakan tersebut karena demokrasi adalah hal penting tetapi kesehatan masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kepentingan kesehatan dan kepentingan demokrasi menjadi sebuah perdebatan yang sengit di tengah masyarakat dan berujung pada meminta ketegasan dari pemerintah untuk dapat menciptakan sebuah keputusan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat karena tidak akan mungkin sebuah pesta demokrasi seperti pilkada terlaksana sedangkan masih terdapat banyak penolakan dan begitupun sebaliknya menunda pilkada sedangkan masyarakat menginginkan penyegaran di kepemimpinan kepala daerah.

Masyarakat masih sedikit menyisakan rasa khawatir akan terulangnya kejadian seperti dalam pilpres tahun 2019 yang mana terdapat beberapa anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mengalami kelelahan hebat. Ketua komisi pemilihan umum (KPU) Arief Budiman pada akhirnya mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 894 anggota KPPS yang meninggal dunia dan lainnya mengalami sakit sebanyak 5.175 petugas KPPS, hal ini tentu dapat menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat yang mana sebelum adanya pandemi sudah banyak korban jiwa akibat proses pemilu apalagi jika proses

pemilu diadakan ketika adanya pandemi tentu membuat masyarakat pun ragu untuk melakukannya.

Dalam mengatasi hal tersebut dibutuhkan aktor yang dapat mengawasi dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang kurang baik di masyarakat. Aktor tersebut juga harus mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat dan mampu menghasilkan sebuah penyelesaian atau sebuah solusi yang mana solusi tersebut mampu di terima dengan baik oleh masyarakat karena posisi masyarakat adalah hal terpenting dan yang memiliki kekuatan terbesar di negara dengan corak demokrasi seperti Indonesia.

Dengan corak negara yang digambarkan sebagai negara demokrasi sehingga posisi masyarakat sipil atau civil society adalah posisi yang sangat kuat karena dengan demokrasi setiap warga negara dipastikan mampu dan dapat menyuarakan apa yang memang menjadi tuntutan kepada pemerintah tanpa adanya tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun. Terdapat dua hal penting yang terdapat dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, pertama adalah proses politik demokratis yang melibatkan rakyat dalam pembuatan kebijakan, kedua yaitu hasilnya baik, dalam arti melayani kepentingan dan membawa keadilan bagi mayoritas rakyat.³

Apabila pemerintahan belum terlaksana dengan baik bukan tidak mungkin akan terjadi sebuah sikap tidak percaya kepada pemerintahan yang dilayangkan oleh masyarakat akibat minimnya pengaruh masyarakat yang ada didalam tubuh

³ Luthfi J. Kurniawan, Hesti Puspitosari, *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi* (Malang:Intrans Publishing,2012), hlm.4.

pemerintah, dalam hal membuat sebuah kebijakan jika hal tersebut memang tidak terjadi maka sebuah negara dapat dikatakan belum secara sempurna menerapkan konsep demokratis dalam pemerintahannya sebab di negara yang memiliki corak demokratis. Civil Society adalah faktor yang menentukan kualitas negara tersebut dan begitu pula sebaliknya.

Dalam hal melakukan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat tidak terkecuali para mahasiswa yang bernaung dalam sebuah organisasi kemahasiswaan yang termasuk salah satu dari bentuk civil society, karena melalui sebuah organisasi kemahasiswaan lah suara-suara rakyat serta suara-suara rakyat dan suara para mahasiswa lebih dapat dengan mudah didengar karena luasnya jaringan yang dimiliki hingga besarnya basis masa yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan, organisasi mahasiswa dapat dikatakan sebagai organisasi yang berasal dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk semuanya karena organisasi mahasiswa mewadahi pemikiran-pemikiran mahasiswa tentang keadaan dan kondisi sosial dan dapat bertukar pikiran dengan mahasiswa lainnya. Sehingga pemikiran yang dimiliki pun semakin luas dengan mengarah pada satu tujuan yang sama dan berusaha untuk mewujudkan suatu misi tersebut yang dapat dirasakan bukan hanya oleh mahasiswa tetapi dirasakan oleh lingkungan disekitarnya.

Mahasiswa juga berperan penting dalam menjadi controler dalam organisasi kemahasiswaan yang diikutinya, dimana dalam menjalankan setiap kegiatannya mahasiswa akan melakukan pengawasan sehingga organisasi

kemahasiswaan ini tidak keluar dari arah yang telah ditetapkan dan pada akhirnya mahasiswa akan selalu melakukan evaluasi sehingga akan ada perbaikan bagi organisasi untuk kedepannya.⁴

Salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di Indonesia adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menjadi salah satu organisasi mahasiswa dengan basis masa atau kader yang terbesar dan tersebar keseluruhan penjuru negara. Hal tersebut tak terlepas dari kenyataan bahwa HMI merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang tertua di Indonesia, sejak didirikan oleh Lafran Pane pada tahun 1947, HMI telah menetapkan tujuannya berdasarkan pada dua pemikiran yaitu keislaman serta ke Indonesiaan. Islam adalah sebuah ajaran universal yang akan menuntun manusia agar dapat hidup sesuai dengan fitrahnya untuk meraih keselamatan, sedangkan maksud Indonesia adalah proyek hidup bersama untuk mencapai kemerdekaan dan kesejahteraan. Berdirinya organisasi HMI juga didasarkan pada semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek ke Indonesiaan. Maka bagi HMI, Islam adalah ruh dan Indonesia adalah tubuh, tak ada pertentangan diantara keduanya.

Himpunan Mahasiswa Islam menjadi salah satu dari pelopor para *agent of change* (pembawa perubahan), *agent of social control* (kontrol sosial), dan *iron stock* (penerus).⁵ Sejatinya *agent of change*, *agent of social control*, dan *iron stock* dapat dikatakan merupakan tugas dan wewenang khusus yang dimiliki oleh para

⁴ Susanti, "Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa", Pendidikan Islam, vol.12, September 2020. hlm. 15.

⁵ Mhd Zakiul Fikri, *Dibawah Naungan Khittah Perjuangan HMI*. (Yogyakarta: Istana Media, 2018), hlm. 5.

mahasiswa pada umumnya, tetapi HMI sebagai organisasi kemahasiswaan yang tertua dan menjadikan Indonesia sebagai tubuh atas tujuan berdirinya organisasi HMI yang berupaya menuju kemerdekaan dan kesejahteraan membuat hal tersebut menjadi yang paling utama dan dapat dikatakan sebagai salah satu dasar pergerakan organisasi dengan kader-kader yang terus dibina dan selalu aktif dalam mementingkan kebutuhan masyarakat dengan keislaman yang menjadi pegangan dalam menjalankan hal tersebut, peran strategis HMI dalam gerakan pembaharuan dan berfungsi sebagai pengkritik dan pengontrol kekuasaan negara.⁶

Himpunan Mahasiswa Islam sekilas menjadi pelopor bagi organisasi kemahasiswaan lainnya, bahkan menjadi pelopor bagi organisasi kemasyarakatan bahwa sebuah organisasi yang bernaung dibawah kepentingan rakyat dan dengan memiliki tujuan mensejahterakan Indonesia harus dan dapat menjadi pengkritik yang lugas terhadap pemerintah terutama terjadi sebuah kecacatan dalam pemerintahan serta menjadi pengontrol kekuasaan yang sering kali disalahgunakan oleh pengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Fungsi kontrol sosial yang kuat akan meminimalisir terjadinya angka penyelewangan tugas dan fungsi kekuasaan oleh para pejabat pemerintahan sebab setiap gerak-gerik di dalam menjalankan roda pemerintahan selalu di kontrol dan dilakukan pengawasan yang ketat dari organisasi-organisasi kemahasiswaan terutama oleh Himpunan Mahasiswa Islam yang menjadi pelopor gerakan pembaharuan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

⁶ Sidrahtahta Mukhtar, *HMI dan Kekuasaan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 16.

Sejak awal berdirinya HMI sudah menampakkan sebagai organisasi pembaharu. *Pertama*, HMI menjadi penggerak munculnya organisasi baru yang memiliki haluan keagamaan seperti organisasi PMKRI, GMKI. *Kedua*, HMI ikut memprakarsai diadakannya kongres Mahasiswa Seluruh Indonesia di Malang Juni 1947 yang mampu melahirkan sebuah federasi antara organisasi-organisasi mahasiswa republikan yang di namakan PPMI.⁷ Tak ayal hal tersebut membuat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam sangat disegani oleh organisasi kemahasiswaan lainnya bahkan oleh pemerintah.

Himpunan Mahasiswa Islam meskipun selalu memiliki peran dalam pemerintahan baik dari penempatan para kader-kader HMI yang mampu berada di kursi kekuasaan strategis maupun sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang memiliki rasa dan tanggung jawab yang besar akan proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Himpunan Mahasiswa Islam tetaplah sebuah organisasi mahasiswa yang memberikan sebuah petunjuk dimana tempat HMI untuk berspesialisasi, dan tugas spesialisasi inilah yang menjadi salah satu fungsi utama HMI. Kalau tujuan adalah menunjukkan dunia cita yang harus diwujudkan maka makna fungsi selanjutnya adalah untuk menunjukkan gerak atau kegiatan (aktifitas) dalam mewujudkan (final goal).

Mahasiswa sebagai kelompok elite dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan

⁷ Ibid, hal. 29

kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan.⁸ Inilah yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh mahasiswa pada umumnya dimana stigma masyarakat memandang bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sehingga sangat diharapkan dapat merubah bangsa menjadi lebih baik salah satu caranya adalah dengan selalu aktif menyuarakan aspirasi rakyat yang tentunya tidak hanya sekedar mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan tetapi mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan sebuah solusi yang inovatif dan dapat diandalkan apabila dalam sebuah pemerintahan tidak berjalan dengan sempurna.

Kader Himpunan Mahasiswa Islam sebagai salah satu bagian dari civil society serta memiliki peran organisasi perjuangan sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang senantiasa memperjuangkan hak-hak masyarakat mulai dari ekonomi, pembangunan, hak memiliki kebebasan dan hak pendidikan dengan satu pedoman tujuan HMI untuk dapat mewujudkan masyarakat adil makmur yang di ridhai Allah SWT dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai organisasi kader dan membangun kembali gerakan intelektual yang selalu menjunjung nilai-nilai dari kebaikan yang menjadi gagasan pokok masyarakat madani. Maka kualitas setiap kader harus meningkat seiring HMI adalah bagian dari civil society yang memiliki kekuatan besar di Indonesia. peran Himpunan Mahasiswa Islam dalam mewujudkan masyarakat adil makmur dengan memanfaatkan fungsi kontrol sosial yang dimiliki dan merupakan hak mutlak bagi seluruh rakyat.

⁸ Hasil-Hasil kongres XXX

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintahan presiden Joko Widodo di tahun 2020 yang baru saja memulai pemerintahannya pada periode kedua pun menetapkan kebijakan Pilkada yang dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19 yang merupakan hasil pembahasan dari beberapa lembaga negara seperti Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu serta Komisi II DPR RI memastikan tanggal 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan setelah penundaan pada tanggal awal yaitu 23 September 2020.

Dengan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya kondusif akibat dampak Pandemi Covid-19 dan tingkat penyebaran yang berbeda-beda pada setiap daerahnya membuat kebijakan tersebut menjadi sorotan utama dalam masyarakat berbagai macam tanggapan muncul dari berbagai macam lapisan masyarakat. Terlebih kondisi sosial dan ekonomi juga cukup terganggu akibat dampak dari pandemi dan masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam hal kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Tetapi, pemerintah justru melaksanakan pilkada serentak yang tidak hanya mengeluarkan biaya besar tetapi juga berpotensi menjadi cluster penyebaran baru Covid-19.

Dari latar belakang serta pernyataan tersebut maka dapat di rumuskan inti dari rumusan masalah yang akan di jelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan dan sikap Himpunan Mahasiswa Islam terhadap kebijakan Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian kali ini adalah guna mengetahui seberapa besar fungsi Himpunan Mahasiswa Islam sebagai kontrol sosial dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 agar berdampak pada pemerintahan yang baik serta konsisten dalam memenuhi semua janji-janji kampanye yang selama ini diucapkan oleh Presiden Joko Widodo selama masa kampanye Presiden. Karena suatu kebijakan dihasilkan oleh bagaimana kepemimpinan politik tersebut berjalan dengan baik dengan menghasilkan dampak baik bagi masyarakat sipil.

Peran organisasi kemahasiswaan terutama Himpunan Mahasiswa Islam akan sangat terlihat sebagaimana organisasi kemahasiswaan pada umumnya yang akan selalu mengawasi jalannya sebuah kebijakan pemerintah dapat diwujudkan dalam mengeluarkan sebuah pandangan dan sikap tegas untuk mewujudkan sistem pemerintahan Indonesia yang bersih, jujur, dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terutama dalam kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak ataupun efek besar bagi kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020.

Sesuai dengan cita-cita dan arah tujuan bangsa yang sejatinya telah tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam Pancasila serta menggali lebih dalam tentang peran Himpunan Mahasiswa Islam sebagai organisasi perjuangan untuk kepentingan umat dengan pengkaderan yang dilakukan secara berkala demi menciptakan kader-kader dengan tingkat intelektualitas yang tinggi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan dari penelitian dilihat secara teoritis dan praktis adalah.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat mengetahui lebih dalam terhadap organisasi kemahasiswaan sehingga menimbulkan minat untuk tergabung dalam salah satu organisasi mahasiswa di perguruan tinggi dan menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam mengetahui bagaimana kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan dan menetapkan kebijakan pilkada tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Di harapkan menjadi gambaran bahwasanya peran yang dimiliki organisasi kemahasiswaan terutama Himpunan Mahasiswa Islam dalam pemerintahan memiliki peran yang signifikan salah satunya dengan melaksanakan fungsi kontrol sosial terhadap sebuah kebijakan, sehingga pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tidak akan terlepas dari peran kontrol yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam sebagai salah satu komponen dari masyarakat atau civil society yang merasakan dampak langsung dari penerapan kebijakan pilkada tahun 2020 meskipun harus terlaksana di tengah pandemi Covid-19.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini penulis membaginya menjadi kedalam 6 (enam) bab yang akan menjadi pedoman utama dalam penulisan penelitian kali ini sehingga hasil penelitian dapat di uraikan secara sistematis, sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan sebuah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan peneilitian dan bagaimana sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian kali ini. Pada bab ini memberikan gambaran secara umum tentang sebuah penelitian yang dilaksanakan dan menjabarkan apa saja yang menjadi rumusan masalah dan membuat penelitian ini dilakukan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka-kerangka pemikiran peneliti tentang penelitian yang dilaksanakan serta menjabarkan penggunaan teori yang sesuai dengan apa yang menjadi bahan penelitian. Teori-teori yang dapat menjadi pendukung lainnya untuk memperdalam isi pembahasan serta ditambah dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat menguatkan hasil penelitian dan diakui keabsahannya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metode-metode yang digunakan oleh penulis ketika penelitian dilaksanakan dengan isi pembahasan yang mengarah pada bagaimana cara peneliti dalam melakukan penelitiannya dan bagaimana teknik yang digunakan pada proses pengumpulan data-data yang dilakukan selama proses penelitian, serta berisikan informasi mengenai dimana lokasi penelitian dilakukan serta waktu dilakukannya penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana sejarah berdirinya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam serta tujuan dari Himpunan Mahasiswa Islam dalam perjalanan organisasinya. Serta menjelaskan gambaran mengenai Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Indonesia.

BAB V : ANALISIS

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang fungsi yang dilakukan dari Himpunan Mahasiswa Islam sebagai kontrol sosial pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2020 sebagai dampak dari pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis tentang hasil dari penelitian fungsi kontrol sosial Himpunan Mahasiswa Islam terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2020 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

